

KONSEP DASAR POLITIK DAN SISTEM PENDIDIKAN INDONESIA

BASIC CONCEPTS OF INDONESIAN POLITICS AND EDUCATION SYSTEM

¹ Aap Siti Ulyani, ² Asri Yuni Fikasari, ³ Anis Fauzi, ⁴ Tuti Asiah
¹ UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Serang, Indonesia
² UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Serang, Indonesia
³ UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Serang, Indonesia
⁴ UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Serang, Indonesia

asitiulyani@gmail.com, asriyunivika@gmail.com, anisfauzi@uin.ac.id, tutiasiyah89@gmail.com

ABSTRACT

Politics in general is a stage to form or build a position of power in society that is useful as a decision maker related to the condition of society. The scope of politics and the state in brief is everything related to power, governance, government processes and organizational forms of government, institutions / institutions, the purpose of the state or its government. The relationship between education and politics is very close and even always related so that with this situation we can see that state politics plays a very important role in determining the direction of educational development in a country. It is no exaggeration if many experts argue that education is one of the efforts or means to maintain state power. The education system in Indonesia which is based on the national education system has a gap between ideals and reality. This can be seen from various factors such as weaknesses in the management sector, low government and community support, weak learning effectiveness and efficiency, low educational resources, and finally weak learning evaluation standards.

Keywords: *Political Basis, Indonesian Education System*

ABSTRAK

Politik secara umum adalah suatu tahapan untuk membentuk atau membangun posisi kekuasaan dalam masyarakat yang berguna sebagai pengambil keputusan terkait dengan kondisi masyarakat. Ruang lingkup Politik dan negara secara singkat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, proses pemerintahan dan bentuk organisasi pemerintahan, lembaga/institusi, tujuan negara atau pemerintahannya. Keterkaitan antara pendidikan dan politik sangat erat bahkan selalu berkaitan sehingga dengan keadaan tersebut dapat kita lihat bahwa politik negara memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan arah perkembangan pendidikan di suatu negara. Tidak berlebihan jika banyak ahli yang berpendapat bahwa pendidikan merupakan salah satu upaya atau sarana untuk mempertahankan kekuasaan negara. Sistem pendidikan di Indonesia yang berbasis pada sistem pendidikan nasional memiliki kesenjangan antara cita-cita dan kenyataan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai faktor seperti kelemahan di sektor manajemen, dukungan pemerintah dan masyarakat yang masih rendah, efektivitas dan efisiensi pembelajaran yang masih lemah, rendahnya sumber daya pendidikan, dan terakhir lemahnya standar evaluasi pembelajaran.

Kata Kunci: Dasar Politik, Sistem Pendidikan Indonesia

Submitted	Accepted	Published
March 05 th 2023	March 17 th 2023	March 25 th 2023

PENDAHULUAN

Pendidikan dan politik merupakan dua bidang yang erat kaitannya dan saling mempengaruhi dalam konteks pembangunan suatu negara. Pendidikan bertujuan untuk menciptakan generasi

yang berkualitas dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi diri serta mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, sementara politik merupakan sarana untuk mencapai tujuan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks Indonesia, sistem pendidikan dan politik memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemahaman konsep dasar politik dan sistem pendidikan Indonesia menjadi sangat penting untuk dikaji dan dipahami.

Politik pada dasarnya adalah hal yang terjadi ketika manusia selalu hidup berkelompok. Dia adalah makhluk sosial yang selalu hidup, dinamis, dan tumbuh secara alami. Oleh karena itu, politik adalah tanda bahwa diri manusia sedang diwujudkan dalam kerangka proses pembangunan. Apa pun alasannya, pengamatan atau analisis politik tidak bisa begitu saja mengabaikan unsur manusia karena manusia adalah esensi politik.

Istilah politik pertama kali digunakan dalam wacana publik oleh Plato dalam bukunya "Politeia", juga dikenal sebagai "Republik". Ini dikembangkan lebih lanjut oleh Aristoteles dalam bukunya "Politica." Karena membahas isu-isu yang berkaitan dengan bagaimana pemerintahan dijalankan. Karya Plato dan Aristoteles ini dipandang sebagai awal pemikiran politik dalam sejarah. Di dalamnya dapat dilihat istilah "politik" digunakan sebagai konsep regulasi masyarakat. Organisasi di suatu wilayah yang dikenal dengan negara adalah organisasi yang memiliki kekuasaan sah tertinggi dan patuh kepada warganya. (Gamurti & Hanum, 2021)(Gamurti & Hanum, 2021)(Gamurti & Hanum, 2021)

Hubungan antara pendidikan dan politik sangat erat bahkan selalu berkaitan sehingga dengan situasi ini dapat diketahui bahwa politik negara memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan pendidikan di suatu negara. Negara Republik Indonesia memiliki kekuatan untuk menciptakan sistem pendidikan, hal ini dinyatakan dalam UU 1945 angka 20 tahun 2003 pasal 1 ayat (2) bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan responsif terhadap tuntutan perubahan zaman. Ayat (2) diikuti dengan ayat (3) yang menyatakan bahwa sistem pendidikan nasional merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. (Konstitusi, 2003)

Padahal, implementasi UU Pendidikan Nasional belum menghasilkan pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia. Setiap kebijakan pendidikan, terutama yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Hal ini penting karena pada dasarnya proses pembuatan kebijakan tidak pernah bebas nilai, sehingga perbedaan kepentingan akan selalu mempengaruhinya. Siswa dan masyarakat umum sering diabaikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Desain penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah desain penelitian deskripsi.

Data dianalisis menggunakan analisis model interaktif. Miles dan Huberman mengatakan bahwa analisis model ini terdiri dari tiga komponen, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, dilakukan dalam bentuk interaktif melalui proses pengumpulan data sebagai siklus. (Fadlilah & Dwi, 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik berasal dari kata bahasa Inggris politics, yang berarti karakter orang atau perbuatan. Ini mengacu pada informasi yang baik dan bijaksana, menurut kamus. Kata Latin *politicus*, yang

berarti berhubungan dengan warga negara, adalah sumber dari kata politik. Selain itu, kata tersebut berasal dari kata polis, yang berarti kota atau kota. (Ahmad Zain Sarnoto, 2012) Dalam bahasa Indonesia, politik sekarang mengacu pada semua hal dan tindakan (kebijakan, taktik) yang melibatkan pemerintahan satu negara atau terhadap negara lain, penipuan, atau kelicikan. Itu juga digunakan sebagai nama untuk bidang pengetahuan yang dikenal sebagai ilmu politik. (Ahmad Zain Sarnoto, 2012)(Ahmad Zain Sarnoto, 2012)

Politik atau definisi dan makna politik secara umum adalah suatu tahapan di mana untuk membentuk atau membangun posisi kekuasaan dalam masyarakat yang berguna sebagai pengambil keputusan terkait dengan kondisi masyarakat. (Hidayat, 2013)

Heywood mendefinisikan politik secara luas sebagai kegiatan menciptakan, memelihara, dan memodifikasi masyarakat atas aturan umum yang mengatur tempat tinggal mereka. Tidak mungkin memisahkan pemilihan dan penentuan prioritas berbagai alternatif dari proses pengambilan keputusan mengenai tujuan sistem politik atau negara. Namun, kebijakan publik mengenai alokasi atau regulasi dan distribusi sumber daya diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. (Gamurti & Hanum, 2021) Ruang lingkup politik dan negara (Gamurti & Hanum, 2021)(Gamurti & Hanum, 2021) secara singkat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, proses pemerintahan dan bentuk organisasi pemerintahan, lembaga/institusi, tujuan negara atau pemerintahannya.

Pembagian, serta alokasi sumber daya yang ada, membutuhkan kekuasaan dan otoritas. Kekuatan dan otoritas ini memainkan peran yang sangat penting untuk mendorong kerja sama atau untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses pencapaian tujuan. Dalam tradisi politik, metode persuasi (meyakinkan) dan kohesif (kekerasan) dapat digunakan. (Studi & Politik, 2021)

Selain itu, politik juga dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu teori klasik Aristoteles, politik adalah upaya yang dilakukan oleh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Teori politik, menurut Miriam Budiardjo adalah pembahasan dan generalisasi fenomena yang bersifat politik. Dengan kata lain, teori politik adalah diskusi dan refleksi atas (a). tujuan kegiatan politik, (b). cara untuk mencapai tujuan itu, (c). kemungkinan dan kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik tertentu, (d). kewajiban yang dihasilkan dari tujuan politik itu. (Raffiudin, n.d.)

Secara teoritis, ilmu politik dibagi menjadi dua, yaitu: (a). Valuational berarti ilmu politik yang didasarkan pada moral dan norma politik. Teori penilaian ini terdiri dari filsafat politik, ideologi dan politik sistematis, (b). Non-valuational berarti bahwa ilmu politik hanya menggambarkan dan satu peristiwa dengan peristiwa lain tanpa menghubungkannya dengan moral atau norma.

Dalam bahasa sehari-hari, politik dimaknai secara beragam, mulai dari pengertian positif, seperti kekuasaan, partai politik, pemerintahan negara, kebijakan pemerintah, kehidupan parlemen hingga gagasan negatif seperti kedai kopi, "gombal amoh", hal-hal yang tidak berguna bagi saya, barang kotor, tindakan manipulatif, licik, kemunafikan dan lain-lain

Jika pengertian politik sebagaimana dikemukakan di atas lebih didominasi oleh pendekatan institusionalis, yang menekankan aspek kenegaraan, maka berikut ini dikemukakan perspektif kekuasaan terhadap politik. Robson, mendefinisikan politik sebagai studi tentang kekuasaan dalam masyarakat. Demikian pula, Deliar Noer menafsirkan politik sebagai studi yang berfokus pada isu-isu kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat. (Arnawan, 2016)

Konsep merupakan elemen penting dalam penelitian dan digunakan oleh peneliti untuk lebih memahami dan memahami dunia di sekitar mereka. Dalam ilmu politik dikenal beberapa konsep

yang disebut konsep politik. Filsuf politik mencari esensi dari konsep-konsep politik seperti kebenaran, hukum atau keadilan. Sarjana politik modern cenderung melihat konsep-konsep seperti: masyarakat, negara, sistem politik, pemerintah, kekuasaan, legitimasi, dll. (Studi & Politik, 2021)

Peluang dan kesulitan telah muncul untuk sistem pendidikan sebagai akibat dari perkembangan teknologi "kecerdasan buatan". Di era "kecerdasan buatan", fitur utama pendidikan ideologi dan politik di perguruan tinggi merupakan perkembangan dari revolusi intelijen solusi, pengembangan konsep pengajaran, dan kemahakuasaan isi pengajaran, dan metode pengajaran. Studi ini lebih lanjut mengeksplorasi kebutuhan dan pengembangan "artificial inteknologi intelijen" dalam pendidikan ideologi dan politik perguruan tinggi melalui kuesioner survei, dan mempromosikan integrasi organik kecerdasan buatan dan ideologis dan politik pendidikan. Menurut hasil dari survei kuesioner, makalah ini mengusulkan jalur pengembangan ideologi perguruan tinggi dan pendidikan politik di era kecerdasan buatan yaitu sekolah dan guru perlu ditingkatkan transformasi pendidikan tradisional serta konstruksi Internet kontemporer pendidikan. Studi ini menawarkan kemungkinan penelitian interdisipliner, memperluas cakupan penelitian pendidikan ideologi dan politik, dan memberikan referensi untuk pengajaran garis depan untuk batas tertentu. (Zhang et al., 2023)

Dalam teori politik yang dibahas adalah masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga negara, perubahan sosial, perkembangan politik, modernisasi, dan sebagainya.

Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan manusia. Anggota masyarakat mendiami wilayah geografis yang memiliki budaya dan institusi yang kira-kira sama. Masyarakat dapat merujuk pada komunitas kecil, misalnya, komunitas kelompok etnis Batak di Sumatera Utara, atau komunitas negara bangsa yang lebih luas seperti masyarakat Indonesia. Dalam masyarakat seperti itu anggota dapat berinteraksi satu sama lain karena faktor budaya dan agama, dan / atau faktor etnis. (Studi & Politik, 2021)

Max Weber: "Negara adalah masyarakat manusia yang (berhasil) mengklaim monopoli penggunaan kekuatan fisik yang sah di dalam wilayah tertentu.

Kekuasaan didefinisikan sebagai kemampuan seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan sumber daya kekuasaan tertentu untuk mempengaruhi perilaku orang atau sekelompok orang lain agar orang atau kelompok tersebut berperilaku sesuai keinginan atau tujuan pihak yang memiliki kemampuan. Negara sebagai organisasi yang memiliki sifat memaksa, monopoli dan mencakup semua membutuhkan kekuasaan untuk memenuhi karakteristik tersebut. (Gamurti & Hanum, 2021)

Hubungan antara pendidikan dan politik sangat erat bahkan selalu berkaitan sehingga dengan situasi ini kita dapat mengetahui bahwa politik negara memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan pendidikan di suatu negara. Tidak berlebihan jika banyak ahli berpendapat bahwa pendidikan merupakan salah satu upaya atau sarana untuk mempertahankan kekuasaan negara. Michael W. Apple dalam Tilaar menjelaskan bahwa politik budaya suatu negara disalurkan melalui lembaga pendidikan sehingga dalam pendidikan kemauan politik atau sistem kekuasaan tersalurkan dalam suatu masyarakat. (Tabrani, 2017)

Ki Hadjar Dewantara dalam kongres Taman Siswa pertama tahun 1930 memaknai pendidikan sebagai upaya mendorong tumbuhnya etika, pikiran, dan raga anak (Mahfud 2009). Driyarkara (dalam Mahfud 2009) memahami pendidikan sebagai upaya memanusiakan manusia.

Memanusiasi manusia berarti mengembangkan segala potensi yang ada dalam diri manusia, baik potensi intelektual, kepribadian, emosional, spiritual, maupun sosial. (Sumanto & Haryanti, 2015)

Dalam masyarakat yang lebih maju, hubungan antara pendidikan dan politik berubah dari pola tradisional ke pola modern. Di negara-negara berkembang yang lebih maju, pendidikan formal memainkan peran penting dalam membawa perubahan politik, termasuk dalam perekrutan dan pelatihan pemimpin politik baru atau elit. Di negara-negara maju, pendidikan berada dalam arus utama kehidupan politik nasional dan merupakan isu penting dalam wacana politik. Dalam masyarakat modern, pendidikan adalah komoditas politik yang sangat penting. (Sumanto & Haryanti, 2015) Kehidupan politik sangat mempengaruhi penyelenggara pendidikan, sebaliknya pendidikan merupakan lembaga penting yang berperan dalam hal pembangunan politik.

Posisi politik dalam Islam sama pentingnya dengan pendidikan. Tanpa otoritas politik, syariah Islam sulit atau tidak mungkin untuk ditegakkan. Kekuasaan adalah sarana untuk membela syiar Islam. Pendidikan terlibat dalam upaya untuk menyadarkan orang untuk mengamati Syariah. Orang tidak akan mengerti syariat tanpa pendidikan. Jika politik (kekuasaan) melindungi dari atas, maka pendidikan melakukan perbaikan melalui arus bawah. Kutipan di atas menegaskan bahwa hubungan antara politik dan pendidikan dalam Pendidikan dan Kebijakan Politik dalam Islam tampaknya begitu dekat. (Hartono, 1999)

Indonesia telah mengatur segala bentuk kegiatan pendidikan nasional melalui peraturan perundang-undangan. UUD 1945 pada ayat 4 mengamanatkan bahwa pendidikan Indonesia harus mampu memberikan pelayanan terbaik bagi anak bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. (Presiden Republik Indonesia, 2003) Secara rinci, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menggambarkan dengan rapi dan sistematis sistem pendidikan Indonesia. Penjabaran prinsip-prinsip Pendidikan di Indonesia tertuang dalam pasal 4 ayat 1 sampai 6. Dalam penelitian Ristianti (2019) menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia berkembang dari era revolusi industri 4.0 ke pendidikan sosial 5.0, menunjukkan bahwa penerapan pendidikan harus dilakukan secara demokratis dan adil serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, dan pluralisme nasional (Parker & Raihani, 2011). Selanjutnya, pasal 5 ayat 1 UU SISDIKNAS mengamanatkan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Amanat ini tampaknya sangat bertentangan dengan amanat undang-undang SISDIKNAS pasal 5 ayat 2 sampai 4, yang menyatakan bahwa hanya warga negara yang memiliki gangguan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial atau tinggal di daerah terpencil atau tertinggal, masyarakat adat terpencil, dan warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat khusus yang berhak atas pendidikan (2003). Sistem pendidikan saat ini tampaknya menjadi salah satu bentuk amanah pasal tersebut, dimana lembaga pendidikan nasional begitu antusias untuk melakukan kompetisi. Pemilahan siswa yang memiliki potensi dan kecerdasan di atas rata-rata dengan siswa yang memiliki potensi kecerdasan di bawah rata-rata merupakan salah satu bukti tersirat. (Adha et al., 2019)

Pendidikan di Indonesia menghadapi situasi yang kompleks untuk pendidikan tinggi. Ekosistem yang kompleks dimaksudkan untuk menyampaikan materi pembelajaran dan mengembangkan bakat potensial untuk menjadi keahlian.

Pendidikan di Indonesia. Tujuannya untuk menjadi interkoneksi antara mahasiswa, dosen/instruktur, perguruan tinggi, lembaga keuangan, lembaga pendanaan, dan pengusaha/industri. Pada akhirnya, kita harus bisa menciptakan yang kuat. (Fajar et al., 2018)

Sistem pendidikan di Indonesia yang didasarkan pada sistem pendidikan nasional terdapat kesenjangan antara cita-cita dan kenyataan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai faktor seperti kelemahan di sektor manajemen, rendahnya dukungan pemerintah dan masyarakat, lemahnya

efektivitas dan efisiensi pembelajaran, rendahnya sumber daya pendidikan, dan akhirnya lemahnya standar evaluasi pembelajaran. Akibatnya, harapan untuk sistem pendidikan yang baik jauh dari sukses. Berbagai solusi yang dikemukakan, termasuk pemutakhiran kurikulum secara nasional, juga masih menemui kendala serius. Situasi ini memerlukan reformulasi yang secara sistemik mempertimbangkan berbagai faktor, yaitu politik, ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. (Munirah, 2015)

Namun demikian, Indonesia adalah negara kepulauan dengan ribuan potensi. Namun, Indonesia adalah salah satu negara yang berhasil membangun sistem pendidikan mega untuk menyatukan semua perbedaan karakteristik siswa.

Sistem Pendidikan Indonesia adalah suatu rangkaian proses pembelajaran formal yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk memberikan pendidikan dan pengajaran kepada seluruh warga negara Indonesia. Sistem ini terdiri dari beberapa jenjang pendidikan, yaitu pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Pendidikan di Indonesia diatur oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Adapun struktur pendidikan di Indonesia terdiri dari:

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Pendidikan Dasar
 - a. Pendidikan Dasar 1 (Kelas 1-3)
 - b. Pendidikan Dasar 2 (Kelas 4-6)
3. Pendidikan Menengah
 - a. Jenjang SMP (Sekolah Menengah Pertama)
 - b. Jenjang SMA (Sekolah Menengah Atas)
4. Pendidikan Tinggi
 - a. D3 (Diploma 3)
 - b. S1 (Sarjana)
 - c. S2 (Magister)
 - d. S3 (Doktor)

Pendidikan di Indonesia juga memiliki berbagai permasalahan, seperti kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, kualitas pendidikan yang belum merata, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, serta kurangnya anggaran pendidikan yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat Indonesia perlu terus berupaya meningkatkan sistem pendidikan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan menyiapkan generasi muda yang berkualitas dan mampu bersaing di tingkat global.

KESIMPULAN DAN SARAN

Politik secara umum adalah suatu tahapan di mana untuk membentuk atau membangun posisi kekuasaan dalam masyarakat yang berguna sebagai pengambil keputusan terkait dengan kondisi masyarakat. Ruang lingkup politik dan negara secara singkat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, proses pemerintahan dan bentuk organisasi pemerintahan, lembaga/lembaga, tujuan negara atau pemerintahannya.

Heywood mendefinisikan politik secara luas sebagai kegiatan menciptakan, memelihara, dan memodifikasi masyarakat atas aturan umum yang mengatur tempat tinggal mereka. Tidak

mungkin memisahkan pemilihan dan penentuan prioritas berbagai alternatif dari proses pengambilan keputusan mengenai tujuan sistem politik atau negara.

Konsep politik, filsuf politik mencari esensi konsep politik seperti kebenaran, hukum atau keadilan. Sedangkan sarjana politik modern cenderung melihat konsep-konsep seperti: masyarakat, negara, sistem politik, pemerintahan, kekuasaan.

Dalam teori politik yang dibahas adalah masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga negara, perubahan sosial, perkembangan politik, modernisasi, dan sebagainya.

Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan manusia. Max Weber: "Negara adalah masyarakat manusia yang (berhasil) mengklaim monopoli penggunaan kekuatan fisik yang sah di dalam wilayah tertentu.

Kekuasaan didefinisikan sebagai kemampuan seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan sumber daya kekuasaan tertentu untuk mempengaruhi perilaku orang atau sekelompok orang lain agar orang atau kelompok tersebut berperilaku sesuai keinginan atau tujuan pihak yang memiliki kemampuan.

Hubungan antara pendidikan dan politik sangat erat bahkan selalu berkaitan sehingga dengan situasi ini kita dapat mengetahui bahwa politik negara memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan pendidikan di suatu negara. Tidak berlebihan jika banyak ahli berpendapat bahwa pendidikan merupakan salah satu upaya atau sarana untuk mempertahankan kekuasaan negara. Sistem pendidikan di Indonesia yang didasarkan pada sistem pendidikan nasional terdapat kesenjangan antara cita-cita dan kenyataan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai faktor seperti kelemahan di sektor manajemen, rendahnya dukungan pemerintah dan masyarakat, lemahnya efektivitas dan efisiensi pembelajaran, rendahnya sumber daya pendidikan, dan akhirnya lemahnya standar evaluasi pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, M. A., Gordisona, S., Ulfatin, N., & Supriyanto, A. (2019). Analisis Komparasi Sistem Pendidikan Indonesia dan Finlandia. *Tadbir : Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 3(2), 145. <https://doi.org/10.29240/jsmp.v3i2.1102>
- Ahmad Zain Sarnoto. (2012). Konsepsi politik pendidikan di Indonesia. *EDUCHILD: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya*, 01(1), 30–40.
- Arnawan, G. (2016). Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi-FIS UNM. *Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi-FIS UNM*, 3(2), 80–84. <http://ojs.unm.ac.id/sosialisasi/article/view/2376>
- Fadlilah, N., & Dwi, W. (2019). *Politik Terhadap Implementasi Kurikulum*. 1–14.
- Fajar, A. N., Nurcahyo, A., & Sriratnasari, S. R. (2018). SOA System Architecture for Interconnected Modern Higher Education in Indonesia. *Procedia Computer Science*, 135, 354–360. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2018.08.184>
- Gamurti, I., & Hanum, L. (2021). Ruang Lingkup Ilmu Politik dan Negara. *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa*, 1(1), 33–37. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JMKB/article/view/13769>
- Hartono, Y. (1999). Kajian Reformasi Pendidikan Di Indonesia Masa Orde Lama Hingga Reformasi. *AGROECOLOGIA Bases Cientificas Para Una Agricultura Sustentable*, 7(2), 65–83. <http://www.leisa-al.org/web/images/stories/revistapdf/vol22n2.pdf#page=30>
- Hidayat, C. (2013). *Konsep-Konsep Dasar dalam Ilmu Politik*. 2–31.

- Munirah. (2015). Sistem Pendidikan di Indonesia antara Keinginan dan Realita. *Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Alauddin Makassar*, 2(2), 233–245.
- Presiden Republik Indonesia. (2003). UU Republik Indonesia Tentang Sistem Pendidikan NASIONAL. *Pusdiklat Perpusnas*, 18(1), 6.
- Raffiudin, D. R. (n.d.). *Ruang Lingkup Teori Politik*. 1–34.
- Studi, P., & Politik, I. (2021). *Modul 1 Ilmu Politik : Ruang Lingkup Dan Konsep Mata Kuliah Pengantar Ilmu Politik*.
- Sumanto, D., & Haryanti, A. (2015). Pendidikan Politik. In *Visipena Journal* (Vol. 7, Issue 1).
- Tabrani. (2017). Antara Politik dan Pendidikan. *ResearchGate*, 1(July), 1–5.
<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.10272.07683>
- UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL. (2003).=
- Zhang, T., Lu, X., Zhu, X., & Zhang, J. (2023). The contributions of AI in the development of ideological and political perspectives in education. *Heliyon*, 9(3), e13403.
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e13403>